

WACANA

Bernegara Ala Ibnu Saud

Oleh: Brigida Intan Printina

MEMBANGUN negara dengan ideologi Pancasila merupakan nilai dasar yang strategis bagi Indonesia. Namun, penghayatan tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Meski begitu kita tidak boleh patah arang dalam menghadapi situasi negara saat ini. Suatu hal krusial yang menjadi perhatian saat ini ialah setiap masyarakat harus memiliki jiwa pemimpin agar mampu mentransformasikan negara ini tanpa meninggalkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sebagai salah satu bangsa dengan umat muslim terbanyak di dunia, Indonesia pasti mengenal salah satu tokoh bersejarah yang sangat berpengaruh di dunia Arab. Ia adalah Ibnu Saud. Ada ciri khas tersendiri yang membuatnya menjadi penguasa sekaligus teladan bagi bangsa Arab pasca pecahnya Perang Dunia I. Tidak jauh berbeda dari sosok Ibnu Saud sebenarnya Indonesia juga memiliki Bapak Bangsa yang menjadi teladan, namun karakter Bapak Bangsa yang ada saat ini menjadi suram ketika banyak penguasa memanfaatkan ideologi anti Pancasila agar tercapai kepentingan politik tersebut.

Bila suatu negara dapat berkembang maka negara lain pun selayaknya mampu menerapkan strateginya.

Tidak menutup kemungkinan bagi bangsa Indonesia. Untuk mengukur seberapa jauh Indonesia akan berada di posisi yang sama dengan negara berkembang salah satunya Arab, maka selayaknya kita mengenal sosok Ibnu Saud ini.

Rekam Jejak

Pasca Perang Dunia I, beberapa wilayah Jazirah Arab termasuk wilayah yang berada di pesisir yaitu Mesir, Sudan bahkan termasuk wilayah yang berbatasan dengan Arab dikuasai oleh Armada Inggris. Inggris menanamkan pengaruh di segala bidang termasuk pemerintahan. Ketika Inggris ingin menaklukkan Arab, hadir lah sosok Ibnu Saud sebagai pemimpin perjuangan kemerdekaan Arab. Beberapa wilayah Arab yang dikuasai Inggris telah ditaklukkan dengan menjadi negara yang merdeka tidak secara defacto karena masih dikuasai Inggris.

Namun, Ibnu Saud memilih netral pasca Perang Dunia I pada 26 Desember 1915 dan melakukan perjanjian dengan Inggris agar negara Arab tidak jatuh ke tangan Inggris. Hal ini membuatnya menjadi sorotan para negara

Barat yang menguasai Arab, dan para pesaingnya termasuk Raja Hussein kerabatnya yang juga sebelumnya mendapat dukungan Inggris untuk menguasai negara Arab.

Dalam hal hubungan bilateral Ibnu Saud menunjukkan kemajuan. Ibnu Saud melihat bahwa negara Arab mampu menjadi negara maju seperti negara Barat lain. Ia menjalankan strategi bekerjasama dengan H. St. John B. Philby, seorang Inggris ahli Arab. Ibnu Saud memandang bahwa Inggris banyak menjalankan strategi di dunia Arab salah satunya di Jeddah, dalam hal perdangan, asuransi, perkapalan, dan perbangkian, lebih banyak dari negara-negara lain.

Kerjasama dengan Inggris memberi keuntungan bagi Ibnu Saud sehingga dapat menjalankan ideologi dan politiknya di seluruh kawasan Jazirah Arab. Ibnu Saud juga berusaha menciptakan stabilitas dengan menandatangani perjanjian persahabatan dengan negara-negara Hashimiyah, Irak dan Transyordania pada tahun 1930 dan 1933.

Lain halnya dengan bidang negara dan pertahanan negara. Ibnu Saud

merasa negaranya terancam saat terjadi konflik di seberang tapal batas Asir oleh Imam Yehya dari Yaman pada tahun 1934. Karena invasi perbatasan ini Yaman mendapatkan kekalahan. Imam Yehya meminta perdamaian dan Ibnu Saud menyetujui rekonsiliasi tersebut dengan menandatangani perjanjian tanpa perubahan wilayah atau pampasan perang pada 23 Juni 1934. Melihat banyaknya kerjasama yang terjalin dengan negara-negara Jazirah Arab, Ibnu Saud berpikir akan perjanjian dengan mengantisipasi agar perjalanan bagi umat muslim di dunia yang akan melakukan ziarah tidak lagi berbahaya.

Tidak ada bedanya prestise dalam bidang perekonomian negara. Ibnu Saud mendapatkan keberuntungan dalam hal ini karena hingga kini pun negara Amerika Serikat masih meneruskan hubungan bilateral dan berawal dari hubungan ekonomi. Dibanding melakukan kerjasama dengan Inggris, Ibnu Saud lebih senang meneruskan hubungan dengan Amerika. Keuntungannya ialah menjamin pembangunan ekonomi negara tanpa menimbulkan kewajibannya politik. **